

## **18. Urusan Pertanahan**

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan
  - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
  - f) Penyediaan alat tulis kantor
  - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor
  - i) Penyediaan makanan dan minuman rapat
  - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
  - k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
  - l) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
  - m) Pengelolaan Dokumen SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
  - n) Penyedia Jasa Langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor.
  - b) Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - c) Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - a) Penyusunan Dokumen Kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
  - b) Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan
  - c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
  - d) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
  - e) Penyusunan Profil Data SKPD 5 tahun



- 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - a) Penyuluhan Hukum Pertanahan
  - b) Pelayanan ijin perubahan penggunaan tanah
  - c) Tertib administrasi pertanahan
  - d) Pengendalian pemanfaatan penggunaan penguasaan dan pemilikan Tanah Kas Desa
  - e) Ploting peta bidang TKD
  - f) Pelayanan Ijin Lokasi, Ijin Pemanfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Umum, Ijin LC/konsolidasi tanah
  - g) Pengelolaan administrasi perijinan
  - h) Monitoring dan evaluasi IPPT dan pelaksanaan Kep.Bupati No. 57/2008
  - i) Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah
  - j) Tertib administrasi SG (tanah Sultan Ground)
  - k) Tertib administrasi Tanah Kas Desa
  - l) Pemetaan batas wilayah kecamatan
  - m) Ploting peta IPPT
- 6) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
  - a) Pengawasan pemanfaatan tanah
  - b) Penyelesaian masalah pertanahan
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
  - a) Pemeliharaan Sistem Informasi Pertanahan
  - b) Update data peruntukkan tanah
  - c) Pengelolaan *single base map*
  - d) Pengelolaan dan pemeliharaan sub domain

**b. Tingkat Pencapaian**

Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.



- 
- a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan 4.484 buah surat.
  - b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak untuk 12 bulan.
  - c) Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang 12 bulan.
  - d) Pembayaran tenaga kontrak dan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan.
  - e) Perbaikan komputer, servis AC, dan perlengkapan kantor 12 bulan
  - f) Penyediaan belanja alat tulis kantor 12 bulan.
  - g) Penyediaan barang cetakan 12 bulan.
  - h) Pelaksanaan perawatan komponen listrik dan elektronik 12 bulan.
  - i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu sebanyak 12 bulan.
  - j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 12 kali.
  - k) Penyediaan kebutuhan materai, perangko dan jasa pengiriman 12 bulan.
  - l) Pangelolaan jasa kearsipan dan perpustakaan 12 bulan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a) Pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan.
    - b) Pengelolaan kendaraan dinas/operasional roda empat 6 buah dan roda dua 11 buah.
    - c) Pemeliharaan peralatan meubelair 12 bulan.
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  
Penyusunan file pegawai, pembuatan daftar nominatif, pembuatan daftar formasi dan bezeting, penjagaan dan pemrosesan KGB pensiun, karis/karsu, askes, dan pembuatan laporan bulanan 12 bulan.
  - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - a) Laporan Capaian Kinerja 1 kali, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 kali, laporan bulanan dan LAKIP 1 kali
    - b) Penyusunan laporan bulanan/SPJ 12 kali, laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) 12 kali, Laporan Tahunan 1 kali, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 1 kali.
    - c) Penyusunan RKA 1 buku , DPA 1 buku, 1 buku Renja SKPD, dan

- program kerja 1 buku, DPPA 1 kali.
- d) LAKIP 1 kali, LPPD 1 kali, Laporan bulanan 12 kali, Laporan Tahunan 1 kali.
  - e) Profil SKPD DPPD 150 eks, Leaflet IPPT, Tanah Kas Desa 3.000 lembar
- 5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- a) Penyuluhan Hukum Pertanahan melalui iklan media cetak 6 kali, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di radio 2 paket, pembuatan papan informasi 3 buah, perawatan papan informasi 1 paket, dan layanan informasi pada 1.027 orang
  - b) Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 434 pemohon
  - c) Monitoring dan evaluasi Tanah Kas Desa yang sudah berizin 35 izin dan pengawasan dan penerbitan pemanfaatan tanah kas desa 37 lokasi.
  - d) Integrasi data spasial dan data tekstual bidang tanah yang sudah bersertifikat di Kabupaten Sleman 5.500 bidang dan Sosialisasi dan Konsultasi teknis pelayanan pertanahan 12 bulan.
  - e) Plotting peta Tanah Kas Desa dan penggunaan lahannya dengan skala 1:5.000
  - f) Penerbitan Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Ijin Konsolidasi Tanah 381 buah.
  - g) Penataan dokumen IPPT 2009 - 2012, *entry data* SIM Perijinan 770 pemohon dan pengiriman arsip tahun 2009 ke Kantor Arsip Daerah
  - h) Monitoring dan evaluasi IPPT dan Pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 57 / 2006 ke 40 pemegang ijin dan penyelesaian permasalahan IPPT dan aduan masyarakat tentang keputusan IPPT 50 buah.
  - i) Monitoring dan pembinaan pemanfaatan tanah pada 42 badan hukum.
  - j) Penerbitan rekomendasi tanah SG yang dipakai Pemerintah Kabupaten Sleman 10 bidang
  - k) Pensertifikatan Tanah Kas Desa 116 bidang



- l) Pemetaan Batas Wilayah Kecamatan Pakem 1 peta
- m) Pemetaan lokasi IPPT 1.000 lokasi
- 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
  - a) Pengawasan dan penerbitan pemanfaatan tanah di 34 desa 50 lokasi
  - b) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah sesuai hukum yang berlaku 12 permasalahan
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
  - a) Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) Pertanahan di 4 kecamatan (Depok, Ngaglik, Mlati, dan Gamping)
  - b) *Update* peta penggunaan lahan 8 kecamatan Penyempurnaan SBM 1:10.000,
  - c) pengelolaan sub domain <http://dppd.slemankab.go.id> 12 bulan

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui penyuluhan hukum pertanahan, penyusunan kebijakan pertanahan, penyusunan *single base map*, pengelolaan SIM Pertanahan, pemetaan batas wilayah kecamatan, plotting peta bidang tanah kas desa dan pensertifikatan tanah kas desa. Kegiatan penyuluhan hukum pertanahan antara lain dilakukan melalui iklan layanan masyarakat di radio sebanyak 2 paket, media cetak 6 kali, papan informasi dan layanan informasi kepada 1.027 orang.

Melalui plotting peta bidang tanah dihasilkan peta bidang dan penggunaan tanah di 1.000 lokasi. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi tanah kas desa juga dilakukan pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 116 bidang sehingga dari 17.582 bidang TKD yang telah bersertifikat menjadi 7.950 bidang atau 45,22%. Adapun tanah kas desa yang dilepaskan untuk kepentingan umum sebanyak 10 bidang.

Dalam rangka Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) telah diterbitkan 384 buah permohonan IPPT dan penerbitan rekomendasi pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk 37 pemohon. Jumlah pemohon IPT Perumahan untuk tahun 2013 sebanyak 41 pemohon, 2

diantaranya ditolak ijinnya.

Perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.41. Data Penerbitan Perizinan Pertanahan Tahun 2011-2013**

No	Jenis Izin	2011	2012	2013
1.	Izin Lokasi	9	20	12
2.	IPT	276	343	326
3.	IPPT	192	222	384
4.	LC	1	1	0
	Jumlah	478	586	722

Sumber: DPPD Kabupaten Sleman

#### **c. SKPD Penyelenggara Urusan**

SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi tersebut sebagaimana terlampir.

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanahan adalah 42 orang SDM dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara rinci, SDM penyelenggara urusan pertanahan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.



---

#### **e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp2.682.233.000,00 realisasi Rp2.521.171.549,00 atau 94,00%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp188.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp159.563.139,00 atau 84,68%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp506.830.000,00 realisasi Rp467.879.585,00 atau 92,31%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp24.950.000,00 realisasi Rp24.472.425,00 atau 98,09%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp125.460.500,00 realisasi Rp114.912.750,00 atau 91,59%
- 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp1.511.589.500,00 realisasi Rp1.443.445.975,00 atau 95,49%
- 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp102.631.000,00 realisasi Rp94.331.500,00 atau 91,91%
- 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp222.350.000,00 realisasi Rp216.566.175,00 atau 97,40%

#### **f. Proses Perencanaan**

Proses perencanaan urusan pertanahan diawali dengan pemetaan permasalahan pertanahan termasuk pemeringkatan prioritas yang harus segera diatasi antara lain berupa pengendalian konversi lahan dan pensertifikatan tanah kas desa serta pemanfaatan lahan tidur. Dari pemeringkatan tersebut disusun program dan kegiatan untuk mengatasi masalah serta mengangkat potensi yang ada.



#### **g. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh SKPD DPPD sebagaimana terlampir.

### **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

#### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan dan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Langganan
  - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - f) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
  - g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
  - i) Penyediaan Makanan dan Minuman rapat
  - j) Rapat Koordinasi dan Konsultasi
  - k) Penyediaan Jasa Keamanan
  - l) Pengelolaan Dokumen SKPD
  - m) Penyediaan Jasa Langganan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





- 
- b) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran
  - c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
  - d) Penyusunan Profil Data SKPD 5 Tahun Terakhir
  - 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
    - a) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
    - b) Koordinasi Penanggulangan Bencana
    - c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
    - d) Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
    - e) Penanganan Darurat Pasca Bencana
    - f) Monitoring dan evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
    - g) Operasional dan Pemeliharaan Rupusdalops dan Pusat Data Informasi (Pusdatin)
    - h) Pengelolaan Sarana Prasarana Penanguangan Bencana
    - i) Antipasi Penanggulangan Bencana Alam
  - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
    - a) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat
    - b) Pengawasan dan pengendalian keamanan
    - c) Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)
  - 7) Program Pemeliharaan Kamtaramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal
    - a) Operasional Linmas dan kesiapsiagaan linmas
    - b) Pembinaan Linmas
    - c) Monitoring kesiagaan keamanan pasar
    - d) Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor
    - e) Pemantauan penyelenggaraan Pilkada, Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa



- 
- 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - a) Fasilitas Kerukunan Umat Beragama
    - b) Fasilitas kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan
    - c) Fasilitas Badan Amil Zakat, Sosialisasi UU Zakat dan pembentukan Unit Pelaksana Zakat
    - d) Fasilitas pembinaan dan evaluasi lomba DBKS
    - e) Pembinaan, dan fasilitas kegiatan mental spiritual
    - f) Koordinasi, monitoring penyelenggaraan ibadah haji
    - g) Pendataan WNA, OT, ORMAS dan LSM
    - h) Implementasi wawasan kebangsaan
  - 9) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - a) Pembinaan wasbang dan pemantapan ideologi negara
    - b) Pemantauan dan pendataan WNA/MNI Keturunan NGO (LSM) dan Lembaga Asing
  - 10) Program Pendidikan Politik Masyarakat
    - a) Penyuluhan kepada masyarakat
    - b) Koordinasi forum-forum diskusi politik
    - c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
    - d) Forum komunikasi antar partai politik
    - e) Forum Koordinasi pembinaan LSM
    - f) Pendampingan PILKADES, PILDUK dan pengisian kepala bagian dan terlantiknya kepala desa dan perangkat desa
  - 11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

**b. Tingkat Capaian**

Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan dan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan



- 
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Langganan 12 Bulan
  - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan
  - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan
  - e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan
  - f) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 12 Bulan
  - g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan
  - h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 12 Bulan
  - i) Penyediaan Makanan dan Minuman rapat 12 Bulan
  - j) Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan
  - k) Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bulan
  - l) Pengelolaan Dokumen SKPD 12 Bulan
  - m) Penyediaan Jasa Langganan 12 Bulan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a) Pemeliharaan gedung 1 unit dan posko 1 unit
    - b) Pemeliharaan rutin/berkala 8 unit kendaraan dinas 12 bulan
  - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
    - Pengelolaan pelayanan kepegawaian 12 bulan dan pembinaan kepegawaian
  - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan
    - a) Laporan bulanan, laporan tahunan, Rencana Kerja Tahunan 1 buah, LAKIP 1 dokumen, monitoring dan evaluasi kegiatan
    - b) Laporan bulanan, Laporan tahunan, Rencana Kerja Tahunan 1 dokumen, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 1 dokumen, monitoring dan evaluasi kegiatan dinas 6 kali
    - c) RKA/DPA, Laporan Keuangan, dan LPJ keuangan 2 dokumen, review renstra 2 dokumen dan renja 2 dokumen
    - d) Profil data hasil pembangunan SKPD 30 eksemplar.
  - 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
    - a) Sosialisasi daerah rawan bencana 7 angkatan 280 orang, sosialisasi forum guru 1 angkatan 50 orang, sosialisasi kewaspadaan bencana di 17 kecamatan
    - b) Operasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana selama 12 bulan dan operasi banjir lahar hujan 12 bulan



- 
- c) Operasional dan pelatihan SAR 1 angkatan, honor SAR 10 bulan
  - d) Operasional dan pemeliharaan 11 unit *Early Warning System* (EWS), 12 unit sirine dan 1 unit penakr hujan serta 3 unit bunker
  - e) Penanganan sarpras yang rusak akibat bencana secara darurat dan verifikasi kerusakan akibat bencana alam di 17 kecamatan
  - f) Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 5 kecamatan
  - g) Operasional dan pemeliharaan Rupusdalops dan Pusdatin 5 angkatan 250 orang, dan database kebencanaan Sleman 1 dokumen
  - h) Pengelolaan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa chainsaw 8 buah, genset 2 buah, rak logistik 4 unit dan alat komunikasi 15 buah
  - i) Gladi lapang daerah rawan bencana 1 angkatan 280 orang
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat
- a) Kerjasama kamtibmas dengan Polres 60 orang 15 kali, posko siaga ketentraman dan ketertiban 35 hari, forkom dan mediasi 10 kali, koordinasi ketentraman dan ketertiban 2 kali
  - b) Pengamanan pejabat dan *foreijder* pejabat /tamun VIP 42 kali dan VVIP 18 kali, pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 35 kali, pengamanan pilkades, pildukuh dan perangkat desa 65 kali, penanggulangan huru hara 8 kali, patroli sambang desa, obyek vital daerah rawan 22 kali
  - c) Fasilitas Kominda 12 kali
- 7) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a) Pembinaan linmas tingkat kecamatan 160 orang, optimalisasi Ruang Pusat Pengendalian Komunikasi (Rupusdalkom) selama 12 bulan.
  - b) Operasional linmas dan kesiapsiagaan linmas di 17 kecamatan, pengerahan linmas 65 kali, Karya Bhakti Linmas untuk mendukung TMMD 32 orang 2 kecamatan, fasilitas dan koordinasi kasatgas desa dan kasi tramtib kecamatan 103 orang di 17 kecamatan.
  - c) Monitoring kesiapsiagaan petugas keamanan pasar pada 7 UPT Pasar



- d) Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor 17 kecamatan selama 12 bulan
- e) Pemantauan penyelenggaraan pilkades, pildukuh dan pengisian perangkat desa 93 kali
- 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 12 kali
  - b) Fasilitasi kegiatan kenegaraan 7 kegiatan meliputi perinatan hari jadi, HUT RI, syawalan gubernur, syawalan pemma, pisah sambut unsur pimpinan dan peresmian gedung dan upacara
  - c) Fasilitasi Badan Amil Zakat 12 kali, sosialisasi Undang-undang zakat dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat 150 orang
  - d) Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di 9 desa
  - e) Pembinaan dan fasilitasi rohani jabatan dan PNS 2.400 orang, pengajian Malam Jum'at Bergema 1.600 orang, Safari Jum'at 17 kali, tarawih keliling 18 kali, fasilitasi kegiatan Masjid Agung 2 kali
  - f) Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan ibadah haji 8 kegiatan
  - g) Pendataan WNA, OT, Ormas, Orpol, LSM 17 kecamatan
  - h) Upacara rutin dan hari besar serta pelatihan paskibraka tingkat kecamatan di 17 kecamatan
- 9) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara untuk 40 orang, pelaksanaan upacara perinatan hari besar 5 kali
  - b) Pemantauan dan pengawasan bekas anggota organisasi terlarang 2 kali, pemantauan dan pendataan WNA/WWNI keturunan 8 kali, NGO (LSM) dan lembaga asing di 17 kecamatan
- 10) Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM dan partisipasi perempuan dalam politik 510 orang
  - b) Verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik kepada partai peraih kursi di DPRD.
  - c) Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 9 kali dan

pemantauan FKDM kecamatan sebanyak 12 kali, pemantauan daerah rawan sosial politik 12 kali.

- d) Pertemuan Forum Komunikasi Antar Partai (FKAP) 2 kali 40 orang,
- e) Forum koordinasi pembinaan LSM/Ormas, sosialisasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2009 2 kali 50 orang.
- f) Pendampingan pilkades 33 kali, pendampingan pilduk 45 kali, monitoring pengisian kepala bagian 15 kali dan penyusunan naskah ujian 1 buah

- 11) Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pembinaan satuan keamanan lingkungan 30 orang satpam, kesamaptaan Pol PP 50 orang 10 kali, pelatihan kamling dan penyuluhan tramtib 8 kali.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana buku lampiran)

Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Kantor Kesatuan Bangsa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa.

Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, dan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar pada Dinas Pasar, dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut sebagaimana terlampir.

### **c. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa sebanyak 22 orang, 116 orang dari Bagian Umum, 14 orang dari Bagian Pemerintahan Desa, 16 orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, 80 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, 69 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 13 orang Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar pada Dinas Pasar, dan 17 Kecamatan.



Secara rinci SDM penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

**d. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp14.998.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.238.801.008,00 atau 74,98%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.044.092.800,00 dan terealisasi sebesar Rp922.190.564,00 atau 88,32%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp1.091.124.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.066.794.441,00 atau 97,77%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp85.727.650,00 dan terealisasi sebesar Rp85.497.450,00 atau 99,73%.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan, anggaran Rp444.857.300,00 dan terealisasi sebesar Rp435.252.750,00 atau 97,84%.
- 5) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar Rp4.964.772.750,00 dan terealisasi sebesar Rp2.165.229.850,00 atau 43,61%.
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban, anggaran sebesar Rp464.371.000,00 dan terealisasi sebesar Rp452.685.500,00 atau 97,48%.
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp3.026.580.050,00 dan terealisasi sebesar Rp2.376.444.700,00 atau 78,52%.
- 8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp128.297.350,00 dan terealisasi sebesar Rp122.087.500,00 atau 95,16%.
- 9) Program Pendidikan Politik Masyarakat anggaran sebesar Rp522.810.000,00 dan terealisasi Rp480.137.410,00 atau 91,84%.
- 10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan

anggaran sebesar Rp2.991.771.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.898.611.093,00 atau 96,89%.

11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp234.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp233.869.750,00 atau 99,89%.

#### **e. Proses Perencanaan**

Proses penyusunan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan melalui kajian prioritas yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD dengan memperhatikan hasil *focus group discussion* dari para pemangku kepentingan, hasil koordinasi dan konsultasi dengan berbagai forum yang ada di Kabupaten Sleman seperti Kominda, serta masukan dari FKUB; evaluasi atas kegiatan deteksi dini dan upaya cegah dini serta analisis kondisi sosial politik di masyarakat. Hasil kajian dan masukan dari forum tersebut digunakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan agar tercapai situasi keamanan dan lingkungan yang kondusif.

#### **f. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa, sebagaimana terlampir.

#### **g. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

- 1) Semakin beragamnya *modus operandi* yang dilakukan para pelaku kejahatan dan adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis informasi (*cyber crime*). Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan, mengefektifkan forum-forum seperti Kominda, deteksi dini cegah dini (*deni cen*), meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, sosialisasi, dan penegakan peraturan kepada masyarakat
- 2) Belum meratanya jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan di lokasi bencana. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan frekuensi pelatihan serta *mapping* kawasan bencana di lokasi-lokasi yang masih rendah jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan bencana.